



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

Rancangan Akhir Renja-PD

Badan Keuangan dan Aset
Daerah Tahun Anggaran 2024

Palangka Raya,

2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Rencana Kerja Akhir Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Akhir Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2021 - 2026.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Akhir Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Palangka Raya,

2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

SYAHFIRI, SE

Pembina Utama Muda(IV/c)

NIP.19681013 199903 1 006

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	25
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	49
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	56
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	57
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	57
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	59
3.3 Program dan Kegiatan	61
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	62
4.1 Rumusan Program dan Kegiatan serta Target Kinerja dan Pendanaan.....	62
BAB V PENUTUP	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 2.4 Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program 2024 dan Kegiatan SKPD Tahun Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Tengah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja Akhir SKPD adalah sebagai acual awal dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Renja Akhir SKPD memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

Penyusunan Renja Akhir Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 secara garis besar meliputi, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Selanjutnya Renja Akhir Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari atau sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Akhir Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

- p. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3 Maksud dan tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Akhir Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif tahun 2024 yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk :

1. Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Memasukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun sebelumnya.
4. Mensinergikan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dan Perkiraan

Capaian Tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Perumusan Program dan Kegiatan serta target kinerja dan pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah ditetapkan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe B yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Adapun dasar hukum terkait tugas pokok dan fungsi BKAD diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara umum, tugas BKAD adalah Membantu Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka BKAD melaksanakan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan dan aset meliputi:

- 1) Merumuskan kebijakan, pengaturan dan penyiapan bahan penyusunan APBD, perubahan APBD serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- 2) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD dan pengelolaan barang milik daerah;
- 3) Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- 4) Mengendalikan Pelaksanaan APBD;
- 5) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- 6) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan daerah dengan instansi / lembaga terkait ;
- 7) Menetapkan Surap Penyediaan Dana (SPD);

- 8) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah ;
- 9) Melaksanakan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- 10) Menyajikan informasi keuangan daerah;
- 11) Melakukan pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- 12) Mengendalikan dan mengawasi tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);
- 13) Mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
- 14) Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah terhadap PD, BULD, serta Kabupaten/Kota:
- 15) Mengkoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pedan dokumen anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- 16) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator dengan target kinerja sebagai instrumen penilaian.

Evaluasi pelaksanaan Renja BKAD dan capaian renstra sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 terlampir :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Tengah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d (tahun berjalan)	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingk at Capai an (%)
1					2	3			4	5	6	8	9	10
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
5	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5	2	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja SKPD	20 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	60%
5	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	60%
5	2	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perubahan	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	60%
5	2	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	60%

5	2	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	60%
5	2	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja, realisasi	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	60%
5	2	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Evaluasi	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	60%
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	60%
5	2	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	60%
5	2	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan semesteran	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	60%
5	2	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah rekonsiliasi laporan realisasi anggaran SKPD	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	60%
5	2	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
5	2	1	1.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jenis asuransi	15 Jenis		3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	60%
5	2	1	1.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah aset milik daerah yang dikelola	35 Lokasi		7 Lokasi	7 Lokasi	100%	7 Lokasi	7 Lokasi	60%
5	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									

5	2	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek/seminar/kursus/lokakarya/workshop	35 Orang		7 Orang	7 Orang	'100%	7 Orang	7 Orang	60%
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik untuk bangunan kantor	65 Komponen		13 Komponen	13 Komponen	'100%	13 Komponen	13 Komponen	60%
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis belanja peralatan/perlengkapan kantor	30 Jenis		6 Jenis	6 Jenis	'100%	6 Jenis	6 Jenis	60%
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah lokasi yang membutuhkan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	'100%	1 Lokasi	1 Lokasi	60%
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Logistik yang disediakan	20 Jenis		4 Jenis	4 Jenis	'100%	4 Jenis	4 Jenis	60%
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan fotocopy	30 Jenis		6 Jenis	6 Jenis	'100%	6 Jenis	6 Jenis	60%
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis media cetak	10 Jenis		2 Jenis	2 Jenis	'100%	2 Jenis	2 Jenis	60%
5	2	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah durasi keperluan makan dan minuman	60 bulan		12 Bulan	12 Bulan	'100%	12 Bulan	12 Bulan	60%
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Durasi keperluan untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	'100%	12 Bulan	12 Bulan	60%
5	2	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	15 Jenis		3 Jenis	3 Jenis	'100%	3 Jenis	3 Jenis	60%

5	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis pengadaan Meubelair	20 Jenis		4 Jenis	4 Jenis	'100%	4 Jenis	4 Jenis	60%
5	2	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	10 Gedung		2 Gedung	2 Gedung	'100%	2 Gedung	2 Gedung	60%
5	2	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis belanja perlengkapan gedung kantor	10 Jenis		2 Jenis	2 Jenis	'100%	2 Jenis	2 Jenis	60%
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									60%
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket jasa pengiriman surat-menyurat	10 Jenis		2 Jenis	2 Jenis	'100%	2 Jenis	2 Jenis	60%
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Pembayaran yang dilakukan	20 Jenis		4 Jenis	4 Jenis	'100%	4 Jenis	4 Jenis	60%
5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	25 Jenis		5 Jenis	5 Jenis	'100%	5 Jenis	5 Jenis	60%
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terakomodirnya gaji ASN PPPK/TEKON BKAD Prov. Kalteng	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	'100%	12 Bulan	12 Bulan	60%
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinan dan perbaikan	10 Jenis		2 Jenis	2 Jenis	'100%	2 Jenis	2 Jenis	60%

					Operasional atau Lapangan									
5	2	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jangka pemeliharaan Mebeleur	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	'100%	12 Bulan	12 Bulan	60%
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	25 Jenis		5 Jenis	5 Jenis	'100%	5 Jenis	5 Jenis	60%
5	2	1	1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah rehabilitasi rumah dinas jabatan	5 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	'100%	1 Lokasi	1 Lokasi	60%
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pekerjaan rehabilitasi sedang/beratgedung kantor	40 Pekerjaan		8 Pekerjaan	8 Pekerjaan	'100%	8 Pekerjaan	8 Pekerjaan	60%
5	2	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan pagar, halaman dan tempat parkir	15 Pekerjaan		3 Pekerjaan	3 Pekerjaan	'100%	3 Pekerjaan	3 Pekerjaan	60%
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
5	2	2	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah									
5	2	2	1.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Laporan yang dikelola	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	'100%	2 Dokumen	2 Dokumen	60%
5	2	2	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Bahan Penyusunan Perubahan APBD TA.2021	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	'100%	2 Dokumen	2 Dokumen	60%
5	2	2	1.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	5 Raperda/Rapergub		1 Raperda/Rapergub	1 Raperda/Rapergub	'100%	1 Raperda/Rapergub	1 Raperda/Rapergub	60%

					Daerah tentang Penjabaran APBD									
5	2	2	1.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 Perda/Pergu ub		1 Perda/Pergu b	1 Perda/Pergu b	'100%	1 Perda/Pergu b	1 Perda/Pergub	60%
5	2	2	1.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD se Kalimantan Tengah	5 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	'100%	1 Tahun	1 Tahun	60%
5	2	2	1.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah rapat-rapat Koordinasi TAPD dalam rangka penyusunan kebijakan keuangan Daerah	5 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	'100%	1 Tahun	1 Tahun	60%
5	2	2	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota									
5	2	2	1.02	1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah keputusan Gubernur tentang bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota	5 Peraturan		1 Peraturan	1 Peraturan	'100%	1 Peraturan	1 Peraturan	60%
5	2	2	1.02	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	10 Peraturan		2 Peraturan	2 Peraturan	'100%	2 Peraturan	2 Peraturan	60%

5	2	2	1.02	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	10 Peraturan		2 Peraturan	2 Peraturan	'100%	2 Peraturan	2 Peraturan	60%
5	2	2	1.02	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dieval	10 Peraturan		2 Peraturan	2 Peraturan	'100%	2 Peraturan	2 Peraturan	60%
5	2	2	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah									
5	2	2	1.03	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah jenis laporan posisi kas daerah	20 Jenis		4 Jenis	4 Jenis	'100%	4 Jenis	4 Jenis	60%
5	2	2	1.03	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Administrasi	5 Jenis		1 Jenis	1 Jenis	'100%	1 Jenis	1 Jenis	60%
5	2	2	1.03	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Jenis Laporan administrasi belanja langsung	5Jenis		1 Jenis	1 Jenis	'100%	1 Jenis	1 Jenis	60%

5	2	2	1.03	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah pengelolaan gaji PNS	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	'100%	12 Bulan	12 Bulan	60%
5	2	2	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									
5	2	2	1.04	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10 Peraturan		2 Peraturan	2 Peraturan	'100%	2 Peraturan	2 Peraturan	60%
5	2	2	1.04	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi yang terkoneksi jaringan	5 Aplikasi		1 Aplikasi	1 Aplikasi	'100%	1 Aplikasi	1 Aplikasi	60%
5	2	2	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akutansi	5 Peraturan		1 Peraturan	1 Peraturan	'100%	1 Peraturan	1 Peraturan	60%
5	2	2	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah									

5	2	2	1.05	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah monitoring bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan di Kabupaten/Kota Tersalurkanya Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa / Kelurahan	5 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	'100%	1 Tahun	1 Tahun	60%
5	2	2	1.05	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya Dana Darurat	5 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	'100%	1 Tahun	1 Tahun	60%
5	2	2	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Tersedianya Dana Bagi Hasil Provinsi	5 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	'100%	1 Tahun	1 Tahun	60%
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH									
5	2	3	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah									
5	2	3	1.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah buku analisa standar belanja	100 Buku		20 Buku	20 Buku	'100%	20 Buku	20 Buku	60%
5	2	3	1.01	3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah buku RKBMD	100 Buku		20 Buku	20 Buku	'100%	20 Buku	20 Buku	60%
5	2	3	1.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengelolaan aset milik Badan Keuangan dan Aset Daerah	70 Kab/Kota		14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	'100%	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	60%
5	2	3	1.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah	5 Jenis		1 Jenis	1 Jenis	'100%	1 Jenis	1 Jenis	60%
5	2	3	1.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	10 Jenis		2 Jenis	2 Jenis	'100%	2 Jenis	2 Jenis	60%

5	2	3	1.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aplikasi yang dikelola Laporan Inventaris barang Meningkatnya penerimaan yang akan menambah PAD	5 Aplikasi 5 Laporan 500%		1 Aplikasi 1 Laporan 100%	1 Aplikasi 1 Laporan 100%	'100%	1 Aplikasi 1 Laporan 100%	1 Aplikasi 1 Laporan 100%	60%
5	2	3	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Data barang yang akan dihapus	10 Kategori		2 Kategori	2 Kategori	'100%	2 Kategori	2 Kategori	60%
5	2	3	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan pengadaan barang triwulan I, II, III, dan IV	20 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	'100%	4 Laporan	4 Laporan	60%
5	2	3	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Buku laporan pelaksanaan seluruh kegiatan berdasarkan anggaran yang ada dalam DPA SKPD Jumlah buku laporan neraca barang milik Pemprov. Kalteng	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	'100%	1 Laporan	1 Laporan	60%
4.02.4.02.01.01					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
4.02.4.02.01.01.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat-menysurat		12 Bulan						
4.02.4.02.01.01.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah rata-rata paket /dokumen/surat yang terkirim		4 Jenis						

4.02.4.02.01.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara		2 Jenis						
4.02.4.02.01.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah jenis asuransi		2 Jenis						
4.02.4.02.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinannya		2 Jenis						
4.02.4.02.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honorarium PNS dan Upah Non PNS		12 Bulan						
4.02.4.02.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki		7 Jenis						
4.02.4.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan ATK		10 Jenis						
4.02.4.02.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan		4 Jenis						
4.02.4.02.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan		13 Komponen						
4.02.4.02.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor		5 Jenis						
4.02.4.02.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah lokasi kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih		5 Lokasi						
4.02.4.02.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis kebutuhan bahan bacaan surat kabar harian		2 Jenis Media Masa						

4.02.4.02.01.01 .17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kebutuhan makan dan minum rapat/tamu kantor		12 Bulan						
4.02.4.02.01.01 .18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah kebutuhan perjalanan dinas luar daerah		12 Bulan						
4.02.4.02.01.01 .19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah		12 Bulan						
4.02.4.02.01.01 .76	Penyusunan dan Penyebaran Informasi Keuangan dan Aset	Jumlah Laporan Rekapitulasi Hasil Penyebaran Informasi Keuangan dan Aset Daerah		1 Laporan						
4.02.4.02.01.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
4.02.4.02.01.02 .07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor		2 Jenis						
4.02.4.02.01.02 .22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor/mess/wisma/asrama yang dipelihara		4 Paket						
4.02.4.02.01.02 .24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		2 Jenis						
4.02.4.02.01.02 .29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah kebutuhan pemeliharaan mebeleur		12 Bulan						
4.02.4.02.01.02 .31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Halaman dan Tempat Parkir	Jumlah kebutuhan pemeliharaan pagar, haman dan tempat parkir		4 Paket						
4.02.4.02.01.02 .141	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah pekerjaan rehabilitasi sedang/berat gedung/mess/asrama		5 Pekerjaan						
4.02.4.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									

4.02.4.02.01.05 .130	Bimtek/Seminar/Lokak arya/Workshop	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek/seminar/kursus/l okakarya/workshop		6 Orang						
4.02.4.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
4.02.4.02.01.06 .01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja		4 Dokumen						
4.02.4.02.01.06 .02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah buku laporan semesteran		1 Laporan						
4.02.4.02.01.06 .04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan semester dan laporan keuangan Badan Keuangan Daerah		2 Laporan						
4.02.4.02.01.06 .06	Penyusunan RKA SKPD	Jumlah dokumen perencanaan		4 Dokumen						
4.02.4.02.01.06 .14	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen LAKIP		1 Dokumen						
4.02.4.02.01.06 .15	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renja SKPD		3 Dokumen						
4.02.4.02.01.06 .16	Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi laporan realisasi anggaran SKPD		1 Dokumen						
4.02.4.02.01.06 .33	Penyusunan Laporan TEPRA/SIMPPD	Jumlah laporan TEPRA/SIMPPD		1 Laporan						
4.02.4.02.01.06 .67	Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pembantu	Terlaksananya Pengelolaan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi di Lingkup BKAD Prov. Kalteng		1 Laporan						

4.02.4.02.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									
4.02.4.02.01.17.01	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah buku analisa standar belanja		1 Pergub						
4.02.4.02.01.17.02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah buku standar satuan harga barang dan jasa		2 Laporan						
4.02.4.02.01.17.03	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi		1 Pergub						
4.02.4.02.01.17.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD		1 Perda						
4.02.4.02.01.17.07	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD		1 Pergub						
4.02.4.02.01.17.08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD		1 Perda						
4.02.4.02.01.17.09	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD		1 Pergub						
4.02.4.02.01.17.10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		1 Perda						
4.02.4.02.01.17.11	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		1 Pergub						

4.02.4.02.01.17 .12	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Tersedianya informasi keuangan daerah		1 Laporan						
4.02.4.02.01.17 .16	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Tertibnya pengelolaan aset/barang milik daerah		45 SKPD						
4.02.4.02.01.17 .20	Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SOPD yang terkoneksi jaringan SIMDA keuangan		45 SKPD						
4.02.4.02.01.17 .27	Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah jenis laporan posisi kas daerah		4 Jenis						
4.02.4.02.01.17 .28	Pengelolaan Gaji PNS	Terlaksananya pengelolaan gaji PNS Pemprov Kalteng		12 Bulan						
4.02.4.02.01.17 .32	Evaluasi dan Koordinasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Gubernur tentang bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota		14 SK						
4.02.4.02.01.17 .39	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah SOPD yang mengikuti asistensi penyusunan laporan keuangan		45 SKPD						
4.02.4.02.01.17 .65	Administrasi Belanja Langsung	Terlaksananya administrasi belanja langsung		12 Bulan						
4.02.4.02.01.17 .75	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi TAPD dalam rangka penyusunan kebijakan keuangan daerah		10 Bulan						
4.02.4.02.01.17 .76	Penyusunan Pergub, NPHD dan SK PPKD	Jumlah dokumen Pergub, NPHD dan SK PPKD		3 Dokumen						
4.02.4.02.01.17 .79	Pemeliharaan Aplikasi E-Budgeting	Jumlah aplikasi E-Budgeting yang terpelihara		1 Paket						
4.02.4.02.01.17 .81	Sosialisasi Permendagri Terkait Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah Peraturan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah		1 Dokumen						

4.02.4.02.01.18	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota									
4.02.4.02.01.18.09	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD se Kalimantan Tengah	Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD se Kalimantan Tengah		1 Kegiatan						
4.02.4.02.01.18.10	Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		14 Raperda/ Raperbup						
4.02.4.02.01.18.18	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		14 SK						
4.02.4.02.01.18.19	Evaluasi Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		14 SK						
4.02.4.02.01.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/kelurahan									
4.02.4.02.01.19.04	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan Keuangan	Terlaksananya monitoring bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan di kabupaten/kota		14 Kab/Kota						

4.02.4.02.01.52	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah									
4.02.4.02.01.52 .01	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah		6 Laporan						
4.02.4.02.01.52 .09	Pengamanan Aset Milik Daerah	Terjaganya aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah		4 Persil/Paket/ Tahun						
4.02.4.02.01.52 .10	Penyusunan RDKMBMD dan DKBMD	Jumlah buku daftar kebutuhan barang milik daerah Pemprov. Kalteng		1 Laporan						
4.02.4.02.01.52 .15	Penghapusan Barang Tidak Bergerak	Jumlah buku data barang tidak bergerak yang akan dihapus		15 Buku						
4.02.4.02.01.52 .17	Penghapusan Barang Bergerak	Jumlah buku data barang bergerak yang akan dihapus		15 Buku						
4.02.4.02.01.52 .18	Rekonsiliasi Pencocokan Data Pengadaan Barang SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah laporan pengadaan barang triwulan I,II,III, dan IV		4 Laporan						
4.02.4.02.01.52 .19	Penyusunan Laporan Akuntansi Barang Milik Daerah	Jumlah buku laporan neraca barang milik Pemprov. Kateng		10 Buku						
4.02.4.02.01.52 .20	Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)	Jumlah laporan inventaris barang		10 Buku						
4.02.4.02.01.52 .21	Penyusunan Laporan Kegiatan Proyek Selesai dan Laporan Realisasi Pengadaan Barang	Jumlah buku laporan pelaksanaan seluruh kegiatan berdasarkan anggaran yang ada dalam DPA		15 Buku						

4.02.4.02.01.52 .22	Pengelolaan Aset Daerah yang Dimanfaatkan	Jumlah aset milik daerah yang dikelola		2 Pergub 1 Laporan						
4.02.4.02.01.52 .29	Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah	Jumlah aplikasi yang dikelola		1 Aplikasi						

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dari 1 sasaran dan 7 indikator yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) . Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.2 terlampir:

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13		14
1	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	WTP		
		Bagi hasil Kabupaten/Kota dan Desa			14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota		14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota		
		Penetapan APBD			60 Hari (Tepat Waktu)	60 Hari (Tepat Waktu)	60 Hari (Tepat Waktu)	60 Hari (Tepat Waktu)	60 Hari (Tepat Waktu)		60 Hari (Tepat Waktu)	60 Hari (Tepat Waktu)	60 Hari (Tepat Waktu)	60 Hari (Tepat Waktu)	
		Presentase belanja Kesehatan			10,03 %	10,03 %	10,03 %	10,03 %	10,03 %		10,03 %	10,03 %	10,03 %	10,03 %	
		Presentase Belanja Pendidikan			30,96 %	30,96 %	30,96 %	30,96 %	30,96 %		30,96 %	30,96 %	30,96 %	30,96 %	
		Presentase SILPA			6,33 %	6,33 %	6,33 %	6,33 %	6,33 %		6,33 %	6,33 %	6,33 %	6,33 %	
		Presentase SILPA			6,33 %	6,33 %	6,33 %	6,33 %	6,33 %		6,33 %	6,33 %	6,33 %	6,33 %	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tetap melakukan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dengan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) serta pemerintah kabupaten/kota khususnya dibidang peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas sumber daya aparturnya yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan daerah lainnya. Teknologi saat ini telah memudahkan informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh penggunanya. Memudahkan pertukaran informasi melalui dunia maya.

Penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan *clean governance* telah menciptakan perubahan-perubahan penting dalam praktek pemerintahan baik pusat maupun daerah. Perubahan tersebut diantaranya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan adanya perubahan tersebut, pemerintah daerah dituntut segera menyesuaikan program dan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan disegala bidang. Dalam bidang pengelolaan keuangan daerah telah terjadi perubahan sistem melalui perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan dengan sistem pengelolaan keuangan yang baru dalam rangka menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah akan berdampak pula pada sistem pertanggungjawaban dan pelaporan yang disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya diharapkan dapat tercapai target yaitu pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain :

- a. Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk menggambarkan kewenangan dan pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang dan sub bidang.
- b. Adanya perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur tentang sistem akuntansi pemerintah.

- c. Belum optimalnya pengelolaan dan penataan aset milik Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan-bantuan kepada pihak ketiga/masyarakat yang belum tepat sasaran.
- e. Kurangnya kesadaran dari aparatur dalam memahami dan mengemban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Dampak dari kendala tersebut dapat menghambat/mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat melalui program-program strategis yang telah tertuang dalam visi dan misi kepala daerah.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain :

- a. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau sejenisnya.
- b. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan daerah.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi dari hasil penyaluran bantuan keuangan kepada organisasi/lembaga/masyarakat apakah bantuan tersebut telah diterima dan digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang diusulkan.
- d. Mendorong percepatan penyerapan anggaran agar dapat berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan cara optimalisasi penggunaan anggaran.
- e. Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- f. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah dengan pengembangan dan penggunaan program aplikasi yang tersedia.
- g. Peningkatan pelayanan publik dalam pencairan dana sesuai dengan standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan masing-masing.
- h. Mewujudkan ketersediaan data dan informasi dibidang pengelolaan keuangan daerah sebagai bahan pengambilan keputusan.
- i. Mengoptimalkan koordinasi penyusunan KUA, PPAS, APBD dan Perubahan APBD;
- j. Peningkatan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

- k. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Tabel Terlampir 2.3 :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah

Nama SKPD : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator inerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				32.809.722.537	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				26.805.031.767	
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				379.322.308	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				379.322.308	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen Renja SKPD	2 Dokumen	130.116.128	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen Renja SKPD	2 Dokumen	130.116.128	

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	37.224.440	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	37.224.440	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen perencanaan perubahan	1 Dokumen	8.470.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen perencanaan perubahan	1 Dokumen	8.470.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1 Dokumen	36.269.145	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1 Dokumen	36.269.145	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	1 Dokumen	6.050.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	1 Dokumen	6.050.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen rencana kerja, realisasi	2 Dokumen	17.914.776	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen rencana kerja, realisasi	2 Dokumen	17.914.776	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah Jenis Laporan Evaluasi	2 Dokumen	143.277.819	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah Jenis Laporan Evaluasi	2 Dokumen	143.277.819	

b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.488.006.907	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.007.781.218	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kalteng	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	18.319.300.043	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kalteng	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	11.764.074.354	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1 Dokumen	47.155.830	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1 Dokumen	122.155.830	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen laporan semesteran	1 Dokumen	44.266.156	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen laporan semesteran	1 Dokumen	44.266.156	
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prov. Kalteng	Jumlah rekonsiliasi laporan realisasi anggaran SKPD	1 Dokumen	77.284.878	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prov. Kalteng	Jumlah rekonsiliasi laporan realisasi anggaran SKPD	1 Dokumen	77.284.878	

c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.122.612.273	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				935.158.798	
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah jenis asuransi	3 Jenis	433.202.379	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah jenis asuransi	3 Jenis	433.202.379	
2	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah aset milik daerah yang dikelola	7 Lokasi	689.409.894	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah aset milik daerah yang dikelola	7 Lokasi	501.956.419	
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				106.976.812	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				106.976.812	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Kalteng	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek/seminar/kursus/lokakarya/workshop	7 Orang	106.976.812	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Kalteng	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek/seminar/kursus/lokakarya/workshop	7 Orang	106.976.812	
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.164.108.962	Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.388.469.040	

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Kalteng	Jumlah komponen listrik untuk bangunan kantor	13 Komponen	41.037.150	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Kalteng	Jumlah komponen listrik untuk bangunan kantor	13 Komponen	41.037.150	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kalteng	Jumlah jenis belanja peralatan/perengkapan kantor	6 Jenis	1.118.773.675	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kalteng	Jumlah jenis belanja peralatan/perlengkapan kantor	6 Jenis	2.324.352.655	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prov. Kalteng	Jumlah lokasi yang membutuhkan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Lokasi	96.800.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prov. Kalteng	Jumlah lokasi yang membutuhkan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Lokasi	96.800.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov. Kalteng	Jumlah Jenis Logistik yang disediakan	4 Jenis	92.564.819	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov. Kalteng	Jumlah Jenis Logistik yang disediakan	4 Jenis	92.564.819	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Kalteng	Jumlah jenis barang cetakan dan fotocopy	6 Jenis	81.819.898	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Kalteng	Jumlah jenis barang cetakan dan fotocopy	6 Jenis	85.000.000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prov. Kalteng	Jumlah jenis media cetak	2 Jenis	130.680.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prov. Kalteng	Jumlah jenis media cetak	2 Jenis	130.680.000	

7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov. Kalteng	Jumlah durasi keperluan makan dan minuman	12 Bulan	109.399.004	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov. Kalteng	Jumlah durasi keperluan makan dan minuman	12 Bulan	125.000.000	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kalteng	Durasi keperluan untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	12 Bulan	301.977.101	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kalteng	Durasi keperluan untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	12 Bulan	301.977.101	
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 Jenis	191.057.315	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 Jenis	191.057.315	
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				329.764.977	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				329.764.977	
1	Pengadaan Mebel	Prov. Kalteng	Jumlah jenis pengadaan Meubelair	4 Jenis	-	Pengadaan Mebel	Prov. Kalteng	Jumlah jenis pengadaan Meubelair	4 Jenis	-	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Gedung	98.468.977	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Gedung	98.468.977	

3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah jenis belanja perlengkapan gedung kantor	2 Jenis	231.296.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah jenis belanja perlengkapan gedung kantor	2 Jenis	231.296.000	
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.025.320.574	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.377.906.350	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kalteng	Jumlah paket jasa pengiriman surat-menyurat	2 Jenis	42.350.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kalteng	Jumlah paket jasa pengiriman surat-menyurat	2 Jenis	42.350.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Kalteng	Jumlah Jenis Pembayaran yang dilakukan	4 Jenis	803.234.076	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Kalteng	Jumlah Jenis Pembayaran yang dilakukan	4 Jenis	803.234.076	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kalteng	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	5 Jenis	108.900.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kalteng	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	5 Jenis	108.900.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kalteng	Terakomodirnya gaji ASN PPPK/TEKON BKAD Prov. Kalteng	12 Bulan	4.070.836.498	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kalteng	Terakomodirnya gaji ASN PPPK/TEKON BKAD Prov. Kalteng	12 Bulan	3.423.422.274	

h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.193.609.724	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.279.652.264	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Kalteng	Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinan danperbaikan	2 Jenis	562.054.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Kalteng	Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinan danperbaikan	2 Jenis	798.113.333	
2	Pemeliharaan Mebel	Prov. Kalteng	Jangka pemeliharaan Mebeleur	12 Bulan	9.680.000	Pemeliharaan Mebel	Prov. Kalteng	Jangka pemeliharaan Mebeleur	12 Bulan	9.680.000	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	5 Jenis	75.963.800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	5 Jenis	75.963.800	
4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah rehabilitasi rumah dinas jabatan	1 Lokasi	279.595.124	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah rehabilitasi rumah dinas jabatan	1 Lokasi	109.595.131	

5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah pekerjaan rehabilitasi sedang/beratgedung kantor	8 Pekerja an	3.110.516.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah pekerjaan rehabilitasi sedang/beratgedung kantor	8 Pekerj aan	2.437.000.000	
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah paket pekerjaan pagar, halaman dan tempat parkir	3 Pekerja an	1.155.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah paket pekerjaan pagar, halaman dan tempat parkir	3 Pekerj aan	1.849.300.000	
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				991.051.038.449	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				1.093.279.713.428	
a	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				3.399.749.735	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				3.652.749.040	
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Prov. Kalteng	Jumlah Laporan yang dikelola	2 Dokume n	520.214.998	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Prov. Kalteng	Jumlah Laporan yang dikelola	2 Dokum en	520.214.998	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Prov. Kalteng	Jumlah Dokumen Bahan Penyusunan Perubahan APBD TA.2021	2 Dokume n	157.694.808	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan	Prov. Kalteng	Jumlah Dokumen Bahan Penyusunan Perubahan APBD TA.2021	2 Dokum en	165.694.113	

						Perubahan PPAS					
3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Prov. Kalteng	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	1 Raperda /Rapergub	490.623.964	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Prov. Kalteng	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	1 Raperda/Rapergub	490.623.964	
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Prov. Kalteng	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Perda/Perdugub	485.647.657	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Prov. Kalteng	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Perda/Perdugub	485.647.657	
5	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Prov. Kalteng	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang	1 Tahun	397.546.633	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan	Prov. Kalteng	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD	1 Tahun	642.546.633	

			Pedoman Penyusunan APBD se Kalimantan Tengah			Bidang Anggaran		se Kalimantan Tengah			
6	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Prov. Kalteng	Jumlah rapat-rapat Koordinasi TAPD dalam rangka penyusunan kebijakan keuangan Daerah	1 Tahun	1.348.021.675	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Prov. Kalteng	Jumlah rapat-rapat Koordinasi TAPD dalam rangka penyusunan kebijakan keuangan Daerah	1 Tahun	1.348.021.675	
b	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				517.940.712	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				517.940.712	
1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Prov. Kalteng	Jumlah keputusan Gubernur tentang bagi hasilpajak provinsi kepada kabupaten/kota	1 Peraturan	85.580.000	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Prov. Kalteng	Jumlah keputusan Gubernur tentang bagi hasilpajak provinsi kepada kabupaten/kota	1 Peraturan	85.580.000	
2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Prov. Kalteng	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentangAPBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	2 Peraturan	137.049.500	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan	Prov. Kalteng	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentangAPBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	2 Peraturan	137.049.500	

	Penjabaran APBD Kabupaten/Kota					Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/ Kota					
3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Prov. Kalteng	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	2 Peraturan	127.140.060	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/ Kota	Prov. Kalteng	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	2 Peraturan	127.140.060	
4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Prov. Kalteng	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota yang dieval	2 Peraturan	168.171.152	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala	Prov. Kalteng	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota yang dieval	2 Peraturan	168.171.152	

	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					
c	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				951.204.926	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				1.072.031.150	
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah jenis laporan posisi kas daerah	4 Jenis	275.117.482	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah jenis laporan posisi kas daerah	4 Jenis	275.117.482	
2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah Laporan Administrasi	1 Jenis	202.820.703	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah Laporan Administrasi	1 Jenis	202.820.703	

3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Prov. Kalteng	Jumlah Jenis Laporan administrasi belanja langsung	1 Jenis	305.170.224	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Prov. Kalteng	Jumlah Jenis Laporan administrasi belanja langsung	1 Jenis	305.170.224	
4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Prov. Kalteng	Jumlah pengelolaan gaji PNS	12 Bulan	168.096.517	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Prov. Kalteng	Jumlah pengelolaan gaji PNS	12 Bulan	288.922.741	
d	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				1.431.366.084	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				1.431.366.084	

1	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	14Kab/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Peraturan	338.570.919	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Prov. Kalteng	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Peraturan	338.570.919	
2	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	14Kab/Kota	Jumlah aplikasi yang terkoneksi jaringan	1 Aplikasi	996.404.750	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah aplikasi yang terkoneksi jaringan	1 Aplikasi	996.404.750	

3	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	14Kab/Kota	Jumlah Peraturan Gubernur tentang KebijakanAkutansi	1 Peraturan	96.390.415	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah Peraturan Gubernur tentang KebijakanAkutansi	1 Peraturan	96.390.415	
e	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				984.750.776.992	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				1.086.605.626.442	
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	14Kab/Kota	Jumlah monitoring bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan di Kabupaten/Kota Tersalurnya Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa / Kelurahan	1 Tahun	7.700.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Prov. Kalteng	Jumlah monitoring bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan di Kabupaten/Kota Tersalurnya Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa / Kelurahan	1 Tahun	18.029.734.300	
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	14Kab/Kota	Tersedianya Dana Darurat	1 Tahun	107.122.806.028	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Prov. Kalteng	Tersedianya Dana Darurat	1 Tahun	107.122.806.028	

3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	14Kab/Kota	Tersedianya Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Tahun	869.927.970.964	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Prov. Kalteng	Tersedianya Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Tahun	961.453.086.114	
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2.645.648.678	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2.495.648.678	
a	Pengelolaan Barang Milik Daerah				2.645.648.678	Pengelolaan Barang Milik Daerah				2.495.648.678	
1	Penyusunan Standar Harga	Prov. Kalteng	Jumlah buku analisa standar belanja	20 Buku	375.681.749	Penyusunan Standar Harga	Prov. Kalteng	Jumlah buku analisa standar belanja	20 Buku	225.681.749	
2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah buku RKBMD	20 Buku	24.693.680	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah buku RKBMD	20 Buku	24.693.680	
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah pengelolaan aset milik Badan Keuangan dan Aset Daerah	14 Kab/Kota	203.039.331	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah pengelolaan aset milik Badan Keuangan dan Aset Daerah	14 Kab/Kota	203.039.331	
4	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah	1 Jenis	449.148.523	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah	1 Jenis	449.148.523	

5	Pengamanan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah Jenis Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	2 Jenis	374.986.260	Pengamanan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah Jenis Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	2 Jenis	374.986.260	
6	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah Aplikasi yang dikelola Laporan Inventaris barang Meningkatnya penerimaan yang akan menambah PAD	1 Aplikasi 1 Laporan 100%	893.528.735	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah Aplikasi yang dikelola Laporan Inventaris barang Meningkatnya penerimaan yang akan menambah PAD	1 Aplikasi 1 Laporan 100%	893.528.735	
7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Data barang yang akan dihapus	2 Kategori	238.574.490	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Data barang yang akan dihapus	2 Kategori	238.574.490	
8	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Laporan pengadaan barang triwulan I, II, III, dan IV	4 Laporan	69.440.690	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Laporan pengadaan barang triwulan I, II, III, dan IV	4 Laporan	69.440.690	

9	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Buku laporan pelaksanaan seluruh kegiatan berdasarkan anggaran yang ada dalam DPA SKPD Jumlah buku laporan neraca barang milik Pemprov. Kalteng	1 Laporan	16.555.220	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Buku laporan pelaksanaan seluruh kegiatan berdasarkan anggaran yang ada dalam DPA SKPD Jumlah buku laporan neraca barang milik Pemprov. Kalteng	1 Laporan	16.555.220	
JUMLAH					1.026.506.409.664					1.122.580.393.873	

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagaimana diketahui bahwa dengan ditetapkannya dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026, maka **Visi Provinsi Kalimantan Tengah**, adalah :

" Kalimantan Tengah MAKIN BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis) "

Misi :

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi Yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan.
2. Memperkuat Ketahanan Daerah dan Mengantisipasi Perubahan Global Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing.
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.

Tujuan :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah.
2. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat.
4. Mewujudkan peningkatan ketahanan daerah terhadap resiko ancaman bencana dan budaya serta kerentanan pangan.
5. Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif.
6. Meningkatkan kualitas SDM.
7. Meningkatkan nilai-nilai agama dalam kehidupan social budaya bermasyarakat.
8. Meningkatkan kesetaraan gender.

Sasaran :

1. Meningkatnya pertumbuhan sector potensial dan industry kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah.
2. Meningkatnya ketercukupan energy.

3. Meningkatnya konektivitas wilayah.
4. Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat.
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
6. Meningkatnya luas lahan kritis yang direhabilitasi.
7. Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah provinsi.
8. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat.
9. Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan.
10. Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
11. Pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air minum sanitasi.
12. Meningkatnya kapasitas antisipasi dan penanganan terhadap bencana dan pandemi.
13. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.
14. Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat.
15. Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan dan pekerjaan penduduk.
16. Meningkatnya kualitas beribadah.
17. Meningkatkan pemajuan pembangunan kebudayaan.
18. Meningkatnya pemberdayaan perempuan.

Dalam perumusan dokumen RKPD akan mengadopsi dan mengekstraksi dari dokumen RPJMD utamanya dalam rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah.

RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun Pertama dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Terkait hal tersebut, dengan mempedomani dokumen RPJMD, maka tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen RPJMD yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2023.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 terhadap hasil analisis kebutuhan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.4 terlampir.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen Renja SKPD	2 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen perencanaan perubahan	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen rencana kerja, realisasi	2 Dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah Jenis Laporan Evaluasi	2 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kalteng	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah dokumen laporan semesteran	1 Dokumen	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prov. Kalteng	Jumlah rekonsiliasi laporan realisasi anggaran SKPD	1 Dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah jenis asuransi	3 Jenis	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah aset milik daerah yang dikelola	7 Lokasi	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Kalteng	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek/seminar/kursus/lokakarya/workshop	7 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Kalteng	Jumlah komponen listrik untuk bangunan kantor	13 Komponen	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kalteng	Jumlah jenis belanja peralatan/perlengkapan kantor	6 Jenis	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prov. Kalteng	Jumlah lokasi yang membutuhkan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Lokasi	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov. Kalteng	Jumlah Jenis Logistik yang disediakan	4 Jenis	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prov. Kalteng	Jumlah jenis barang cetakan dan fotocopy	6 Jenis	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prov. Kalteng	Jumlah jenis media cetak	2 Jenis	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov. Kalteng	Jumlah durasi keperluan makan dan minuman	12 Bulan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kalteng	Durasi keperluan untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	12 Bulan	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Prov. Kalteng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 Jenis	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Mebel	Prov. Kalteng	Jumlah jenis pengadaan Meubelair	4 Jenis	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Gedung	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah jenis belanja perlengkapan gedung kantor	2 Jenis	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kalteng	Jumlah paket jasa pengiriman surat-menyurat	2 Jenis	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Kalteng	Jumlah Jenis Pembayaran yang dilakukan	4 Jenis	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kalteng	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	5 Jenis	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kalteng	Terakomodirnya gaji ASN PPPK/TEKON BKAD Prov. Kalteng	12 Bulan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Kalteng	Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinan dan perbaikan	2 Jenis	
	Pemeliharaan Mebel	Prov. Kalteng	Jangka pemeliharaan Mebeleur	12 Bulan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	5 Jenis	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah rehabilitasi rumah dinas jabatan	1 Lokasi	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah pekerjaan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	8 Pekerjaan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah paket pekerjaan pagar, halaman dan tempat parkir	3 Pekerjaan	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				

	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Prov. Kalteng	Jumlah Laporan yang dikelola	2 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Prov. Kalteng	Jumlah Dokumen Bahan Penyusunan Perubahan APBD TA.2021	2 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Prov. Kalteng	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	1 Raperda/Rapergub	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Prov. Kalteng	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Perda/Pergub	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Prov. Kalteng	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD se Kalimantan Tengah	1 Tahun	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Prov. Kalteng	Jumlah rapat-rapat Koordinasi TAPD dalam rangka penyusunan kebijakan keuangan Daerah	1 Tahun	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Prov. Kalteng	Jumlah keputusan Gubernur tentang bagi hasilpajak provinsi kepada kabupaten/kota	1 Peraturan	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Prov. Kalteng	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentangAPBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	2 Peraturan	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Prov. Kalteng	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentangPerubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	2 Peraturan	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Prov. Kalteng	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKabupaten/Kota yang dieval	2 Peraturan	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah jenis laporan posisi kas daerah	4 Jenis	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Prov. Kalteng	Jumlah Laporan Administrasi	1 Jenis	

	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Prov. Kalteng	Jumlah Jenis Laporan administrasi belanja langsung	1 Jenis	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Prov. Kalteng	Jumlah pengelolaan gaji PNS	12 Bulan	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	14Kab/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Peraturan	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	14Kab/Kota	Jumlah aplikasi yang terkoneksi jaringan	1 Aplikasi	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	14Kab/Kota	Jumlah Peraturan Gubernur tentang KebijakanAkutansi	1 Peraturan	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	14Kab/Kota	Jumlah monitoring bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan di Kabupaten/Kota Tersalurnya Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa / Kelurahan	1 Tahun	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	14Kab/Kota	Tersedianya Dana Darurat	1 Tahun	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	14Kab/Kota	Tersedianya Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Tahun	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
	Pengelolaan Barang Milik Daerah				
	Penyusunan Standar Harga	Prov. Kalteng	Jumlah buku analisa standar belanja	20 buku	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah buku RKBMD	20 buku	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah pengelolaan aset milik Badan Keuangandan Aset Daerah	14 Kab/Kota	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah	1 Jenis	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah Jenis Pengamanan Aset Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah	2 Jenis	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Jumlah Aplikasi yang dikelola Laporan Inventaris barang Meningkatnya penerimaan yang akan menambahPAD	1 Aplikasi 1 Laporan 100 %	

	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Data barang yang akan dihapus	2 Kategori	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Laporan pengadaan barang triwulan I, II, III, dan IV	4 Laporan	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Prov. Kalteng	Buku laporan pelaksanaan seluruh kegiatan berdasarkan anggaran yang ada dalam DPA SKPD Jumlah buku laporan neraca barang milik Pemprov. Kalteng	1 Laporan	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sehingga Badan Keuangan dan Aset Daerah hanya melakukan tugas koordinatif sesuai dengan kewenangannya dibidang pengelolaan keuangan daerah yaitu membantu Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota. Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2023 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan langsung dari masyarakat yang lebih bersifat teknis. Namun selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Badan Keuangan dan Aset Daerah mengakomodir usulan masyarakat berupa subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang diusulkan baik dari organisasi, lembaga maupun kelompok masyarakat serta pemerintah desa.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, serta Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah yang harus disinkronisasikan dengan kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dimana terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut :

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
 - a. Pengendalian Jumlah Penduduk;
 - b. Reformasi Pembangunan Kesehatan:
 - 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (*demand and supply*);
 - 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
 - c. Reformasi Pembangunan Pendidikan;
 - d. Sinergi Percepatan.
2. Bidang Ekonomi
 - a. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas;
 - b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
 - c. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
 - d. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi;
 - e. Reformasi Keuangan Negara.
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - a. Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Bidang Sarana dan Prasarana
 - a. Peningkatan Ketahanan Air;

- b. Penguatan Konektivitas Nasional:
 - 1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah;
 - 2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi;
 - 3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan.
- c. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar:
 - 1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional;
 - 2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi;
 - 3) Penataan Perumahan/Permukiman.
- 5. Bidang Politik
 - a. Konsolidasi Demokrasi.
- 6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
 - a. Percepatan Pembangunan MEF dan Almitsus POLRI dengan
 - b. Pemberdayaan Industri Pertahanan;
 - c. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri.
- 7. Bidang Hukum dan Aparatur
 - a. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik;
 - b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- 8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang
 - a. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan;
 - b. Pengelolaan Risiko Bencana;
 - c. Sinergi Pembangunan Perdesaan.
- 9. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
 - a. Perkuatan Ketahanan Pangan;
 - b. Peningkatan Ketahanan Energi;
 - c. Percepatan Pembangunan Kelautan;
 - d. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup.

Sedangkan untuk RPJMN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, dengan agenda pembangunan nasional sebagai penjabaran operasional dari visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yaitu :

- 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus mendukung tercapainya bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sinkronisasi kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tabel Terlampir 3.1

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

a. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang Searah dengan kebijakan Umum Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan

b. Sasaran

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan diatas, maka perlu dirumuskan sasaran yang dikaitkan dengan target kinerja Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang Akuntabel.

Tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Visi : “Kalimantan Tengah MAKIN BERKAH”(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)			
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang Searah dengan kebijakan Umum Daerah dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan koordinasi dan sinergisitas perencanaan anggaran baik antar SKPD maupun dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan APBD yang berkualitas, yang mengakomodir visi dan misi pemerintah daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. Memberikan kesempatan kepada aparatur di bidang pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kompetensinya. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan anggaran secara secara akuntabel, adil, transparan, partisipatif, efektif, dan efisien. Meningkatkan sistem pelaporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan pembinaan secara intensif dan mengevaluasi APBD Kabupaten/Kota dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan Estándar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara cepat, tepat, transparan dan profesional. Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik Persiapan SDM aparatur pelaksana pemerintahan. Optimalisasi kinerja aparatur.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan. Sehingga output Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah Program Tahunan yang sesuai dengan indikator kinerja program/kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan diarahkan untuk mencapai visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah.

b) Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program awal yang diusulkan untuk dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah 3 (tiga) program yang didukung oleh 14 (empat belas) kegiatan dan 69 (enam puluh sembilan) Sub Kegiatan.

2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah serta luar Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Provinsi dan melingkupi semua Kabupaten/Kota.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Rencana kerja program dan kegiatan serta pagu indikatif Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1. Terlampir :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Kalimantan Tengah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				24.471.413.269				26.918.554.596
5	2	1	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				317.105.601				348.816.161
5	2	1	1.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja SKPD	Prov. Kalteng	2 Dokumen	85.000.000	APBD		2 Dokumen	93.500.000
5	2	1	1.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	Prov. Kalteng	1 Dokumen	21.500.000	APBD		1 Dokumen	23.650.000
5	2	1	1.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perubahan	Prov. Kalteng	1 Dokumen	15.000.000	APBD		1 Dokumen	16.500.000
5	2	1	1.0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Prov. Kalteng	1 Dokumen	15.000.000	APBD		1 Dokumen	16.500.000
5	2	1	1.0 1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	Prov. Kalteng	1 Dokumen	15.000.000	APBD		1 Dokumen	16.500.000
5	2	1	1.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja, realisasi	Prov. Kalteng	2 Dokumen	8.000.000	APBD		2 Dokumen	8.800.000

5	2	1	1.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Evaluasi	Prov. Kalteng	2 Dokumen	157.605.601	APBD		2 Dokumen	173.366.161
5	2	1	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.949.651.905				13.144.617.096
5	2	1	1.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kalteng	12 Bulan	11.764.074.354	APBD		12 Bulan	12.940.481.789
5	2	1	1.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	Prov. Kalteng	1 Dokumen	51.871.413	APBD		1 Dokumen	57.058.554
5	2	1	1.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan semesteran	Prov. Kalteng	1 Dokumen	48.692.772	382.449.800		1 Dokumen	53.562.049
5	2	1	1.0 2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah rekonsiliasi laporan realisasi anggaran SKPD	Prov. Kalteng	1 Dokumen	85.013.366	APBD		1 Dokumen	93.514.703
5	2	1	1.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				835.158.798	APBD			918.674.678
5	2	1	1.0 3	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jenis asuransi	Prov. Kalteng	3 Jenis	433.202.379	APBD		3 Jenis	476.522.617
5	2	1	1.0 3	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah aset milik daerah yang dikelola	Prov. Kalteng	7 Lokasi	401956419	APBD		7 Lokasi	442.152.061
5	2	1	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				206.976.812				227.674.493
5	2	1	1.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek/seminar/kursus/lokakarya/workshop		7 Orang	206976812			7 Orang	227.674.493
5	2	1	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.655.390.470				1.820.929.517
5	2	1	1.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik untuk bangunan kantor	Prov. Kalteng	13 Komponen	41.037.150	APBD		13 Komponen	45.140.865

5	2	1	1.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis belanja peralatan/perlengkapan kantor	Prov. Kalteng	6 Jenis	793.500.000	APBD		6 Jenis	872.850.000
5	2	1	1.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah lokasi yang membutuhkan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Prov. Kalteng	1 Lokasi	96.800.000	APBD		1 Lokasi	106.480.000
5	2	1	1.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan fotocopy	Prov. Kalteng	6 Jenis	50.000.000	APBD		6 Jenis	55.000.000
5	2	1	1.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis media cetak	Prov. Kalteng	2 Jenis	130.680.000	APBD		2 Jenis	143.748.000
5	2	1	1.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah durasi keperluan makan dan minuman		12 Bulan	120.338.904			12 Bulan	132.372.794
5	2	1	1.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Durasi keperluan untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Prov. Kalteng	12 Bulan	251.977.101	APBD		12 Bulan	277.174.811
5	2	1	1.0 6	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Prov. Kalteng	3 Jenis	171.057.315	APBD		3 Jenis	188.163.047
5	2	1	1.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				557.300.000				613.030.000
5	2	1	1.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis pengadaan Meubelair	Prov. Kalteng	4 Jenis	457.300.000	APBD		4 Jenis	-
5	2	1	1.0 7	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis belanja perlengkapan gedung kantor	Prov. Kalteng	2 Jenis	100.000.000	APBD		2 Jenis	110.000.000
5	2	1	1.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.331.656.350				4.764.821.985
5	2	1	1.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket jasa pengiriman surat-menyerurat	Prov. Kalteng	2 Jenis	25.000.000	APBD		2 Jenis	27.500.000

5	2	1	1.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Pembayaran yang dilakukan	Prov. Kalteng	4 Jenis	803.234.076	APBD		4 Jenis	883.557.484
5	2	1	1.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Prov. Kalteng	5 Jenis	80.000.000	APBD		5 Jenis	88.000.000
5	2	1	1.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terakomodirnya gaji ASN PPPK/TEKON BKAD Prov. Kalteng	Prov. Kalteng	12 Bulan	3.423.422.274	APBD		12 Bulan	3.765.764.501
5	2	1	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.618.173.333				5.079.990.666
5	2	1	1.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinan dan perbaikan	Prov. Kalteng	2 Jenis	798.113.333	APBD		2 Jenis	877.924.666
5	2	1	1.0 9	5	Pemeliharaan Mebel	Jangka pemeliharaan Mebeleur	Prov. Kalteng	12 Bulan	9.680.000	APBD		12 Bulan	10.648.000
5	2	1	1.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	Prov. Kalteng	5 Jenis	39.000.000	APBD		5 Jenis	42.900.000
5	2	1	1.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pekerjaan rehabilitasi sedang/beratgedung kantor	Prov. Kalteng	8 Pekerjaan	2.500.000.000	APBD		8 Pekerjaan	2.750.000.000
5	2	1	1.0 9	1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan pagar, halaman dan tempat parkir	Prov. Kalteng	3 Pekerjaan	1.271.380.000	APBD		3 Pekerjaan	1.398.518.000
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				1.095.349.665.437				1.204.884.631.981
5	2	2	1.0 1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				3.213.100.270				3.534.410.297
5	2	2	1.0 1	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Laporan yang dikelola	Prov. Kalteng	2 Dokumen	429.929.750	APBD		2 Dokumen	472.922.725

5	2	2	1.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Bahan Penyusunan Perubahan APBD TA.2021	Prov. Kalteng	2 Dokumen	130.326.288	APBD		2 Dokumen	143.358.917
5	2	2	1.0 1	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	Prov. Kalteng	1 Raperda/Rap ergub	490.623.964	APBD		1 Raperda/Rap ergub	539.686.360
5	2	2	1.0 1	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	Prov. Kalteng	1 Perda/Pergub	485.647.657	APBD		1 Perda/Pergub	534.212.423
5	2	2	1.0 1	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD se Kalimantan Tengah	Prov. Kalteng	1 Tahun	328.550.936	APBD		1 Tahun	361.406.030
5	2	2	1.0 1	1 3	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah rapat-rapat Koordinasi TAPD dalam rangka penyusunan kebijakan keuangan Daerah	Prov. Kalteng	1 Tahun	1.348.021.675	APBD		1 Tahun	1.482.823.843
5	2	2	1.0 2		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		Prov. Kalteng		517.940.712	APBD			569.734.783
5	2	2	1.0 2	1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah keputusan Gubernur tentang bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota	Prov. Kalteng	1 Peraturan	85.580.000	APBD		1 Peraturan	94.138.000
5	2	2	1.0 2	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Prov. Kalteng	2 Peraturan	137.049.500	APBD		2 Peraturan	150.754.450

					Penjabaran APBD Kabupaten/Kota								
5	2	2	1.0 2	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Prov. Kalteng	2 Peraturan	127.140.060	APBD		2 Peraturan	139.854.066
5	2	2	1.0 2	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dieval	Prov. Kalteng	2 Peraturan	168.171.152	APBD		2 Peraturan	184.988.267
5	2	2	1.0 3		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Prov. Kalteng		811.433.218	APBD			892.576.540
5	2	2	1.0 3	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah jenis laporan posisi kas daerah	Prov. Kalteng	4 Jenis	206.699.836	APBD		4 Jenis	227.369.820
5	2	2	1.0 3	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Administrasi	Prov. Kalteng	1 Jenis	167.620.416	APBD		1 Jenis	184.382.458

5	2	2	1.0 3	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Jenis Laporan administrasi belanja langsung	Prov. Kalteng	1 Jenis	252.206.797	APBD		1 Jenis	277.427.477
5	2	2	1.0 3	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah pengelolaan gaji PNS	Prov. Kalteng	12 Bulan	184.906.169	APBD		12 Bulan	203.396.786
5	2	2	1.0 4		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Prov. Kalteng		602.434.207	APBD			662.677.628
5	2	2	1.0 4	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		2 Peraturan	280.000.000			2 Peraturan	308.000.000
5	2	2	1.0 4	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi yang terkoneksi jaringan	Prov. Kalteng	1 Aplikasi	216.404.750	APBD		1 Aplikasi	238.045.225
5	2	2	1.0 4	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akutansi	Prov. Kalteng	1 Peraturan	106.029.457	APBD		1 Peraturan	116.632.403

5	2	2	1.0 5		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Prov. Kalteng		1.090.204.757.030	APBD			1.199.225.232.733
5	2	2	1.0 5	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah monitoring bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan di Kabupaten/Kota Terselurnya Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa / Kelurahan	Prov. Kalteng	1 Tahun	6.979.734.300	APBD		1 Tahun	7.677.707.730
5	2	2	1.0 5	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya Dana Darurat		1 Tahun	107.122.806.028			1 Tahun	117.835.086.631
5	2	2	1.0 5	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Tersedianya Dana Bagi Hasil Provinsi	Prov. Kalteng	1 Tahun	976.102.216.702	APBD		1 Tahun	1.073.712.438.372
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2.109.315.167				2.320.246.684
5	2	3	1.0 1		Pengelolaan Barang Milik Daerah		Prov. Kalteng		2.109.315.167	APBD			2.320.246.684
5	2	3	1.0 1	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah buku analisa standar belanja	Prov. Kalteng	20 buku	225.681.749	APBD		20 buku	248.249.924
5	2	3	1.0 1	3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah buku RKBMD	Prov. Kalteng	20 buku	24.693.680	APBD		20 buku	27.163.048
5	2	3	1.0 1	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengelolaan aset milik Badan Keuangandan Aset Daerah	Prov. Kalteng	14 Kab/Kota	203.039.331	APBD		14 Kab/Kota	223.343.264
5	2	3	1.0 1	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah	Prov. Kalteng	1 Jenis	249.148.523	APBD		1 Jenis	274.063.375
5	2	3	1.0 1	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Prov. Kalteng	2 Jenis	588.652.749	APBD		2 Jenis	647.518.024

5	2	3	1.0 1	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aplikasi yang dikelolaLaporan Inventaris barangMeningkatnya penerimaan yang akan menambahPAD	Prov. Kalteng	1 Aplikasi1 Laporan100 %	493.528.735	APBD		1 Aplikasi1 Laporan100 %	542.881.609
5	2	3	1.0 1	1 0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Data barang yang akan dihapus	Prov. Kalteng	2 Kategori	238.574.490	APBD		2 Kategori	262.431.939
5	2	3	1.0 1	1 1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan pengadaan barang triwulan I, II, III, dan IV	Prov. Kalteng	4 Laporan	69.440.690	APBD		4 Laporan	76.384.759
5	2	3	1.0 1	1 2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Buku laporan pelaksanaan seluruh kegiatanberdasarkan anggaran yang ada dalam DPA SKPD Jumlah buku laporan neraca barang milikPemprov. Kalteng	Prov. Kalteng	1 Laporan	16.555.220	APBD		1 Laporan	18.210.742
					JUMLAH				1.121.930.393.8 73				1.234.123.433. 260

BAB V

PENUTUP

Penyempurnaan Akhir Rencana Kerja Akhir Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ini merupakan dokumen rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026 dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan target pembangunan yang telah dijabarkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Rencana Kerja Akhir Badan Keuangan dan Aset Daerah juga merupakan dokumen perencanaan dalam penyusunan rumusan program dan kegiatan tahun 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Selain sebagai dokumen perencanaan, Renja berfungsi pula sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD Tahun 2024.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan Badan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang demi tercapainya visi dan misi serta kebijakan dan prioritas pembangunan.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan dokumen